

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Fitria Kurniawati (2018) Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi. Penelitian ini berjudul Implementasi Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program Bank Sampah Malang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode analisis dan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bank Sampah Malang: Untuk implementasi program Bank Sampah Malang dalam upaya pemberdayaan masyarakat terdapat dua program yang dijalankan di BSM yaitu program tabungan sampah dan program pembelajaran pengolahan sampah. Program tabungan sampah dimaksudkan untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan dari sampah dan mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA. Sedangkan program pembelajaran pengolahan sampah diperuntukkan bagi pihak-pihak yang ingin belajar mengenai bagaimana mengolah sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). BSM sendiri sudah mulai menjalankan program ini sejak tahun 2011 dengan menggunakan dana bantuan dari CSR PLN dan hibah dari Pemkot Malang dan masih berjalan hingga kini serta telah mandiri dalam sektor ekonomi. Dan Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

program Bank Sampah Malang dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak aktor yang terlibat, sumberdaya yang digunakan, dan struktur birokrasi yang mendukung. Komunikasi terjalin dengan erat antar aktor dan informasi disampaikan dengan jelas serta seluruh pihak telah mengerti tugas dan wewenangnya dengan baik. Aktor pelaksana sendiri juga memiliki kesediaan dalam melaksanakan program yang dimiliki Bank Sampah tanpa adanya paksaan.

2. Norhikmah (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (STIA).

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diambil melalui *purposive sampling* berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan Teknik Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka uji kredibilitas data, perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa tingkat kebersihan pelaksanaan kebijakan masih kurang baik. Pertama, komunikasi pada indikator transmisi masih belum baik, pada indikator kejelasan informasi masih belum baik dilihat dari kurangnya sosialisasi. Kedua, sumber daya pada

indikator staf belum baik dan juga kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan pada indikator fasilitas masih belum baik seperti kurangnya tempat sampah bagi setiap desa, dll. Ketiga, disposisi pada indikator sikap pelaksana kebijakan sudah baik dan pada indikator kedisiplinan pegawai sudah baik. Keempat, struktur birokrasi pada indikator fragmentasi sudah baik dan pada indikator standar operasional prosedur sudah baik karena sudah ada pembagian tugas yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, fasilitas yang kurang lengkap dan staf yang kurang. faktor pendorong yaitu sikap pelaksanaan kebijakan dan adanya kerjasama antar pegawai. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan kejelasan informasi kebijakan secara menyeluruh, menambah fasilitas sarana prasarana. Kepada kepala dinas lingkungan hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan dengan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kepada para pegawai diharapkan agar selalu menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana program yang telah direncanakan. Kepada masyarakat agar lebih aktif lagi berpartisipasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.

Adapun penelitian yang sedang dilakukan yaitu Implementasi Program Bank Sampah Pada Bank Sampah Induk Buncu Elha

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jika di bandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu dimana penelitian ini membahas bagaimana pengimplementasian program bank sampah pada bank sampah induk buncu elha sedangkan penelitian terdahulu milik Fitria Kurniawati lebih berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat dan Norhikmah fokus pada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2022:1) “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan terbaik.”

Kebijakan publik menurut Indra Kertati, dkk. (2023:1) secara umum dapat didefinisikan sebagai “Sebuah sistem berupa regulasi yang merupakan tindakan pengaturan, atau prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan oleh entitas pemerintah. Dalam arti luas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam mengatur masyarakat.”

Sementara itu, menurut Anderson dalam Marwiyah (2022:12) mendefinisikan ‘Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.’

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2021:2) ‘Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).’

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13) antara lain:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.

5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan procedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

2. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Marwiyah (2022: 14-16) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada di dalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai

arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut diatas maka hemat penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirumuskan secara sistematis melalui interaksi berbagai aktor, baik dalam bentuk tindakan maupun tidak bentuk tindakan, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan publik, mengatur kehidupan masyarakat, serta mencapai kesejahteraan umum melalui tahapan penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam Syahrudin (2019:28), dimana implementasi diartikan sebagai "*getting a job done*" dan "*doing a.*" Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resources*.

Sementara itu menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marwiyah (2022:36) melihat 'Implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.'

Sedangkan menurut Wahab dalam Marwiyah (2022:36) 'Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.'

Menurut Riant dalam Joko Pramono (2022:2) 'Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan

atau turunan dari strategi tersebut. Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat operasional langsung meliputi perintah presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur.'

b. Model Implementasi

1. Model Warwick

Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Warwick mengemukakan bahwa model Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan, pembagian potensi. (dalam Kadji Y, 2015)

a. Kemampuan Organisasi:

Dalam tahapan ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibedakan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (Standar

Oprasional Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi

Kurangnya informasi dari para actor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

c. Dukungan

Kurang kesediaan objek-objek kebijakan “terkait” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

d. Pembagian Potensi

Pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

2. Model Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikemukakan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, (dalam Agustion, 2020:154-158).

a. *Communication/Komunikasi*

Komunikasi ialah suatu yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. *Resource/Sumber daya*

Daya Sumber daya merupakan hal yang penting, sumber daya utama adalah staf. serta informasi yang mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Adapun wewenang yang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya pada sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif.

c. *Disposition or attitudes* (Disposisi atau sikap)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out (melaksanakan) kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. *Bureaucratic structures*/Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi

yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic Fragmentation (perpecahan birokrasi) karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

3. Modal Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi

formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori tersebut diatas maka hemat penulis menyimpulkan bahwa Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pihak terkait, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi tidak hanya sekedar menjalankan kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur penting seperti sumber daya manusia, dana, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakannya. Selain itu, implementasi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, melalui program atau strategi yang telah ditentukan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan.

3. Program Bank Sampah

a. Pengertian Program Bank Sampah

Program Bank Sampah merupakan salah satu inovasi dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Konsep bank sampah mengadopsi mekanisme perbankan, di mana masyarakat berperan sebagai “nasabah” yang menyetorkan sampah terpilah, kemudian sampah tersebut ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan sesuai dengan

nilai ekonominya. Hasil tabungan dapat diuangkan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan pengelola dan nasabah.

Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui sistem ini, masyarakat didorong untuk membiasakan diri memilah sampah dari rumah tangga, memahami nilai ekonomi sampah, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, bank sampah adalah fasilitas untuk pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.

Peraturan ini menegaskan bahwa bank sampah tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular (*circular economy*), yaitu sistem ekonomi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya. Dengan demikian, bank sampah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional pengurangan sampah dan pencapaian target pengelolaan sampah nasional.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ditegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Bank sampah merupakan salah satu implementasi konkret dari amanat undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek pengurangan sampah di sumber.

Menurut Asteria dan Heruman (2016), bank sampah merupakan instrumen sosial yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah serta sebagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Keberhasilan bank sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.

Sementara itu, KLHK (2022) menyatakan bahwa bank sampah adalah model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mendukung transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih berkelanjutan melalui pengurangan timbulan sampah, peningkatan daur ulang, dan penguatan ekonomi masyarakat.

b. Fungsi Bank Sampah

Bank Sampah merupakan salah satu inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memiliki bagian fungsi penting dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Fungsi tersebut mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap kebijakan

pemerintah.

1. Fungsi Lingkungan

Fungsi utama bank sampah adalah mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Melalui sistem pemilahan sampah dari sumbernya, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan Kembali atau didaur ulang. Hal ini sejalan dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah.

2. Fungsi Edukasi

Bank sampah berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan. Melalui kegiatan pemilahan, penimbangan, dan pencatatan sampah, masyarakat memperoleh pemahaman tentang jenis-jenis sampah dan pentingnya pengelolaan yang benar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 menegaskan bahwa bank sampah merupakan sarana edukasi dan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, bank sampah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan budaya peduli lingkungan.

3. Fungsi Ekonomi

Bank sampah memiliki fungsi ekonomi karena sampah yang disetorkan masyarakat memiliki nilai jual. Sampah yang telah dipilah akan ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, kemudian

dicatat sebagai tabungan. Sistem ini menjadikan sampah sebagai komoditas yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Sosial

Bank sampah juga berfungsi memperkuat partisipasi dan solidaritas sosial masyarakat. Kegiatan pengelolaan bank sampah biasanya melibatkan kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, atau komunitas lokal. Melalui partisipasi ini, tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan.

5. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Bank sampah berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan keterampilan pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna, seperti kerajinan tangan atau kompos. Hal ini mendorong tumbuhnya usaha kecil berbasis daur ulang dan mendukung konsep ekonomi sirkular.

6. Fungsi Pendukung Kebijakan Pemerintah

Bank sampah merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam pengurangan sampah. Dalam Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 ditegaskan bahwa bank sampah mendukung pelaksanaan ekonomi sirkular dan pengurangan sampah nasional. Dengan adanya bank sampah, pemerintah daerah terbantu dalam mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan pembahasan diatas maka hemat penulis menyimpulkan bahwa program bank sampah merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan tujuan mengurangi timbulan sampah dari sumbernya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah melalui mekanisme seperti perbankan. Program bank smapah ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa variabel yang sangat menentukan keberhasilan Implementasi Program Bank Sampah pada Bank Sampah Induk Buncu Elha. Model Implementasi menurut Warwick (dalam Kadji Y 2015:70-71) Implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Kemampuan Organisasi, Informasi, Dukungan, Pembagian Potensi.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

